

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT ATAS HARTA  
YANG DIPEROLEH DARI HIBAH SETELAH ORANG TUA  
ANGKATNYA MENINGGAL DUNIA**

**TESIS**



**PRO PATRIA**

**OLEH :**

**RYAN ADITYA, S.H  
NIM 12211044**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2016**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
3.1. Tujuan Penelitian .....	6
3.2. Manfaat Penelitian .....	7
4. Tinjauan Pustaka .....	7
4.1. Pengangkatan Anak .....	7
4.2. Hibah Dalam hukum Islam .....	11
4.3. Batal Demi Hukum dan Akibat Hukum .....	13
4.4. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan .....	14
5. Metode Penelitian .....	16
a. Tipe Penelitian .....	16
b. Pendekatan Masalah .....	16
c. Bahan Hukum .....	16
d. Analisis Bahan Hukum .....	17
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	17
BAB II : PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIAJUKAN	

OLEH AHLI WARIS .....	19
1. Dasar Hukum Hibah .....	19
1.1. Hibah Menurut Hukum Perdata .....	19
1.2. Hibah Dalam Hukum Islam .....	26
2. Dasar Hukum Kewarisan .....	35
3. Pembatalan Hibah .....	43
<b>BAB III : UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK</b>	
<b>ANGKAT UNTUK MEMPERTAHANKAN HARTA</b>	
<b>YANG DIPEROLEH DARI HIBAH ORANG TUA</b>	
<b>ANGKATNYA .....</b>	<b>48</b>
1. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	48
2. Perlindungan Hukum Terhadap anak Angkat Atas	
Wasiat Wajibah .....	56
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	
1. Kesimpulan .....	
2. Saran .....	
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya berkaitan dengan pembatalan hibah kepada anak angkat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang mengajukan permohonan pembatalan akta hibah dari pewaris adalah tidak berlandaskan hukum, karena hibah hanya dapat dicabut jika berkaitan dengan hibah orang tua kepada anak. Apabila dengan adanya hibah tersebut ternyata terdapat ahli waris dari penghibah yang dirugikan, maka dapat mengajukan gugatan dengan menggunakan dasar ketentuan pasal 210 KHI, bahwa hibah tidak boleh lebih  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta benda penghibah, maka hibah kepada anak angkat tersebut dikurangkan hingga tidak lebih  $\frac{1}{3}$  dari harta benda warisan tersebut.
- b. Upaya hukum yang dilakukan oleh anak angkat untuk mempertahankan harta yang diperoleh dari hibah orang tua angkatnya, yaitu mengajukan permohonan peninjauan kembali atas pembatalan hibah tersebut. Hal ini karena anak angkat tetap akan mendapatkan haknya atas harta warisan orang tua angkatnya tetapi tidak sebagai ahli waris, karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dengan mendapatkannya atas dasar wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta warisan orang tua angkatnya.

## 2. Saran

- a. Hendaknya hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma dari penghibah kepada penerima hibah tersebut dipertimbangkan agar mendapat kepastian bagi penerima hibah dari kemungkinan dicabut, karena hibah menurut hukum Islam hanya dapat dicabut jika hibah orang tua kepada anak. Apabila terdapat ahli waris yang dirugikan, tidak mengajukan permohonan pembatalan hibah, melainkan berkaitan dengan batasan jumlah hibah.
- b. Dibatalkannya hibah tersebut tentunya merugikan penerima hibah, untuk itu hendaknya penerima hibah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Mahkamah Agung atas dasar dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana pasal 67 huruf f UUMA.



## DAFTAR BACAAN

### Buku:

- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005
- Ash-Shabuniy, Muhammad Ali et.al, *Hukum Waris Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, tnp, Jakarta, 2003
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Haar, B.Ter, Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat = Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960
- Hadjon, Pihpus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hamzah, Amir dan Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam kompilasi Hukum Islam*, IKIP Malang 1994
- Kalaf, Abdulwahab, *Usul al Fiqhi, Dewan Dakwah Islam Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah)*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia (sebelum perang dunia II)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004

Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985

Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 1989

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984

#### **Media/Majalah**

Majalah Konstitusi Juni 2013, Miftahul huda, *Batal Demi Hukum*, [edukasi.kompasiana.com/2013/10/19/batal-demi-hukum](http://edukasi.kompasiana.com/2013/10/19/batal-demi-hukum)

